

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBELAJARAN BUDAYA MELAYU
RIAU DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU**
TAHUN 2023-2024

Oleh : Rindiyani Septia

Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusian Ilmu Pemerintah

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya; Jl. HR. Soebrantas KM. 12,5 Simp Baru Pekanbaru, 28293

Telp/Fax. 0761-6327

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the local content learning policy of Riau Malay Culture (BMR) in the curriculum in Pekanbaru City in the 2023-2024 academic year. The study focuses on policy implementation, using the George C. Edward III policy implementation model which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research method used is qualitative. Data were collected through interviews with relevant parties such as the Education Office, the Riau Malay Traditional Institution (LAMR) of Pekanbaru City, school principals, and teachers. The results of the study indicate that the implementation of the BMR policy faces various obstacles, including lack of socialization and limited human resources, as well as ineffective coordination between the Education Office and LAM Pekanbaru City. The implications of this study are the need to improve communication, provide adequate resources, strengthen teacher capacity, and improve coordination between institutions to ensure the effective and sustainable implementation of the BMR policy.

Keywords: Policy Implementation, Riau Malay Culture, Curriculum, Education.

**A. LATAR
MASALAH**

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013. Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal (Alfi, 2021) . Pendidikan muatan lokal budaya Melayu Riau merupakan salah satu

BELAKANG

upaya untuk melestarikan dan mempromosikan budaya Melayu Riau (Majid & Ramadan, 2021). Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau telah menjadi landasan bagi pelaksanaan pembelajaran muatan lokal budaya Melayu Riau di sekolah-sekolah, namun, dengan adanya perubahan kurikulum dan kebutuhan zaman, pemerintah provinsi Riau melakukan perubahan peraturan dengan mengeluarkan Peraturan

Gubernur Provinsi Riau Nomor 40 Tahun 2023. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembelajaran muatan lokal budaya Melayu Riau dan memastikan bahwa kurikulum yang digunakan relevan dengan kebutuhan zaman dan perkembangan pendidikan (Chaerani, et al., 2024).

Kota Pekanbaru memiliki keberagaman etnis Melayu mewakili 26% penduduknya., meskipun persentase ini relatif kecil dibanding kelompok etnis lain, keberadaan etnis Melayu tetap signifikan dan menjadi dasar penting bagi pelestarian budaya Melayu Riau. Implementasi kebijakan pembelajaran budaya Melayu Riau dalam kurikulum pendidikan menjadi kesempatan untuk memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai budaya Melayu kepada seluruh siswa, terlepas dari latar belakang etnis mereka, sehingga menciptakan rasa kebersamaan dan apresiasi terhadap warisan budaya lokal, juga apakah kebijakan tersebut dapat afektif dalam memperkenalkan dan melestarikan budaya Melayu di tengah keberagaman etnis yang ada di Kota Pekanbaru.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Aatas Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2018 tentang pelaksanaan pembelajaran muatan lokal budaya Melayu Riau, menerangkan bahwa untuk memperkuat kualifikasi guru pengampu mata pelajaran muatan lokal budaya Melayu Riau dan penerapan muatan lokal pada kurikulum merdeka, pada Pasal 12 yang diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Guru Mulok BMR memiliki pengetahuan budaya Melayu,

berkarakter Melayu dan memiliki komitmen untuk memajukan dan mengembangkan budaya Melayu Riau dengan kualifikasi Strata-1 dalam bidang:

- a. Sastra Melayu;
- b. Sastra Daerah;
- c. Seni Budaya;
- d. Bahasa Melayu;
- e. Bahasa dan Satra Indoneisa;
- f. Bahasa Jepang;
- g. Bahasa Arab;
- h. Sosiologi;
- i. Sejarah;
- j. Ekonomi; atau
- k. Pendidikan Agama Islam

Pasal 12 ini berubah dengan harapan memperkuat kualifikasi guru pengampu mata pelajaran muatan lokal budaya Melayu Riau. Mata pelajaran muatan lokal bertujuan memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan perilaku kepada peserta didik agar mereka memiliki wawasan yang mantap tentang keadaan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai/aturan yang berlaku di daerahnya dan mendukung kelangsungan pembangunan daerah serta pembangunan nasional (Shah Mohd Akmal Abdul Halim, 2022). Ciri dan tujuan mata pelajaran muatan lokal jika dihubungkan dengan pengertian konsep kearifan lokal, yakni semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis (Muktadir Abdul dan Agustrianto, 2014). Muatan lokal di Provinsi Riau tertuang pada mata pelajaran Budaya Melayu Riau (BMR) (Naratiba et al., 2021).

Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau Di Kota Pekanbaru terdapat pasal yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Dinas Pendidikan dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi guru Mulok BMR di Daerah.

Pasal 16

Dinas Pendidikan dapat bekerja sama dengan LAMR dan/ atau LAMR Pekanbaru untuk mengeluarkan sertifikat bagi guru yang layak untuk mengajarkan Mulok BMR di Daerah

setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan Mulok BMR.

Pasal 15 dan 16 mangamatkan peran Dinas Pendidikan dalam peningkatan kompetensi guru Muatan Lokal BMR melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi. Pasal 15 memberikan mandat agar Dinas Pendidikan melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi guru Muatan Lokal di daerah, sementara Pasal 16 menekankan pentingnya kerjasama dengan LAMR untuk sertifikasi guru yang layak mengajar, namun, implementasi dilapangan masih mengalami kendala.

Tabel 1.3 Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negri dan Swasta di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru tahun 2023-2024.

NO	Kecamatan	Jumlah Sekolah SD (Negeri)	Jumlah Sekolah SD (Swasta)	Jumlah
1.	Payung Sekaki	11	17	28
2.	Tuahmadani	-	-	-
3.	Binawidya	-	-	-
4.	Bukit Raya	16	7	23
5.	Marpoyan Damai	19	20	39
6.	Tenayan Raya	23	9	32
7.	Kulim	-	-	-
8.	Limapuluh	14	9	23
9.	Sail	6	2	8
10.	Pekanbaru Kota	3	7	10
11.	Sukajadi	13	6	19
12.	Senapelan	13	-	13
13.	Rumbai	8	6	14
14.	Rumbai Barat	-	-	-
15.	Rumbai Timur	-	-	-
16.	Kota Pekanbaru	126	83	209

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2024.

Tabel 1.3 Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negri dan Swasta di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru tahun 2023-2024.

NO	Kecamatan	Jumlah Sekolah SD (Negeri)	Jumlah Sekolah SD (Swasta)	Jumlah
1.	Payung Sekaki	11	17	28
2.	Tuahmadani	-	-	-
3.	Binawidya	-	-	-
4.	Bukit Raya	16	7	23
5.	Marpoyan Damai	19	20	39
6.	Tenayan Raya	23	9	32
7.	Kulim	-	-	-
8.	Limapuluh	14	9	23
9.	Sail	6	2	8
10.	Pekanbaru Kota	3	7	10
11.	Sukajadi	13	6	19
12.	Senapelan	13	-	13
13.	Rumbai	8	6	14
14.	Rumbai Barat	-	-	-
15.	Rumbai Timur	-	-	-
16.	Kota Pekanbaru	126	83	209

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2024.

Banyaknya Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kota Pekanbaru dengan jumlah guru yang tidak mencukupi di bidang budaya Melayu menyebabkan permasalahan yang muncul dalam implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan pembelajaran budaya Melayu Riau di Kota Pekanbaru menghadapi berbagai permasalahan yang saling berkaitan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah yaitu “Mengapa

Implementasi Kebijakan pembelajaran budaya Melayu Riau dalam kurikulum pendidikan Kota Pekanbaru tahun 2023-2024 belum optimal?”.

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pembelajaran budaya Melayu Riau dalam kurikulum pendidikan Kota Pekanbaru tahun 2023-2024.

TINJAUAN TEORI

Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah memahami apa yang senyataanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara (Moleong, 2017). Kebijakan merupakan terjemahan dari policy yang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang memiliki wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dan bertanggung jawab untuk melayani kepentingan umum. Anderson mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Kebijakan pada intinya adalah sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman ini boleh jadi amat sederhana atau kompleks, bersifat umum maupun khusus.

Pengertian implementasi apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan perwujudan dari adanya keputusan yang telah dibuat secara terstruktur dan terorganisir untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang berguna bagi masyarakat.

Menurut *George C. Edward III* (1981: 9-12) sebelum melaksanakan suatu kebijakan, perlu mempertimbangkan dua hal penting: kondisi awal yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan kebijakan, serta potensi kendala yang mungkin muncul selama proses implementasi. *George C. Edward III* (1980: 17) menjelaskan bahwa ada empat variabel yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu:

1. Komunikasi (*Communication*), komunikasi yang baik dalam implementasi kebijakan dapat menghasilkan output yang lebih optimal. Terdapat tiga indikator dalam komunikasi, yaitu:
 - a). Transformasi informasi dimensi (*transmisi*), transmisi ini menghendaki agar kebijakannya disampaikan tidak hanya kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - b). Kejelasan (*clarity*), menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan tersebut untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.
 - c). Konsistensi (*consistency*), diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu

keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaan yang telah di keluarkan.

2. Sumber Daya (*Resources*), mengemukakan bahwa: bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan.

3. Disposisi atau sikap, perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

4. Struktur birokrasi, yaitu struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi. SOP atau prosedur-

prosedur kerja adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan dan aktivitas pegawai diantara beberapa unit. Tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Keseluruhan proses penetapan baru ini bisa mulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah terperinci, program yang telah dirancang untuk mewujudkan tujuan dari sasaran tersebut (Zainuddin, 2018).

Keberhasilan implementasi kebijakan ini dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksanaan, penerapan kebijakan dengan desain, tujuan, dan sasaran kebijakan itu sendiri (Tambak, 2018), serta memberikan dampak atau hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi (Yoan Colina, 2021).

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan menggunakan data kualitatif (teks, narasi, observasi) untuk memahami makna dan pengalaman subjek penelitian. Data dikumpulkan dengan menfokuskan penelitian pada beberapa SMP dan SD di Kota Pekanbaru sebagai contoh kasus. Melakukan observasi mendalam dan partisipatif di lingkungan sekolah untuk memahami budaya dan praktik pembelajaran budaya Melayu Riau (Zakariah et al., 2020). Penelitian ini

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan menggunakan data kualitatif (teks, narasi, observasi) untuk memahami makna dan pengalaman subjek penelitian. Data dikumpulkan dengan menfokuskan penelitian pada beberapa SMP dan SD di Kota Pekanbaru sebagai contoh kasus. Melakukan observasi mendalam dan partisipatif di lingkungan sekolah untuk memahami budaya dan praktik pembelajaran budaya Melayu Riau (Zakariah et al., 2020). Informan dalam penelitian ini meliputi Dinas Pendidikan Kot Pekanbaru, Lembaga Adat Melayu Riau kota Pekanbaru, kepala sekolah dan guru.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Pekanbaru, sebagai ibu kota Provinsi Riau, memiliki karakteristik demografis, historis dan sosio-kultural yang khas, yang secara langsung memengaruhi implementasi kebijakan pembelajaran BMR, memahami konteks ini sangat penting untuk menafsirkan temuan penelitian dan merumuskan rekomendasi yang relevan. Pekanbaru mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat akibat urbanisasi. Migrasi dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan dari luar negeri, telah menciptakan masyarakat yang multikultural. Meskipun budaya Melayu Riau merupakan akar dari kota ini, pengaruh budaya lain semakin terasa. Hal ini menciptakan tantangan dalam menjaga identitas budaya Melayu Riau di tengah arus globalisasi dan heterogenitas masyarakat. Kebijakan pembelajaran BMR menjadi salah satu upaya untuk memperkuat identitas tersebut di kalangan generasi muda.

Pekanbaru memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan di wilayah Riau. Sungai Siak memegang peranan penting dalam perkembangan kota ini sebagai jalur transportasi dan perdagangan utama,. Warisan budaya Melayu Riau tercermin dalam arsitektur bangunan bersejarah, seni pertunjukan tradisional, kuliner khas, dan adat istiadat masyarakat, namun, pelestarian warisan budaya ini menghadapi tantangan akibat perkembangan zaman dan perubahan gaya hidup masyarakat. Kebijakan pembelajaran BMR diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan apresiasi terhadap warisan budaya ini di kalangan siswa. Masyarakat Melayu Riau di Kota Pekanbaru dikenal dengan nilai-nilai keislaman yang kuat, adat istiadat yang kaya, serta seni dan budaya yang bergam, namun pengaruh budaya asing dan gaya hidup modern telah menyebabkan pergeseran nilai-nilai tradisional di kalangan generasi muda. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya identitas budaya Melayu Riau. Pembelajaran BMR diharapkan dapat menjadi wahana untuk mentransmisikan nilai-nilai luhur budaya Melayu Riau kepada generasi muda, sehingga mereka tetap memiliki akar budaya yang kuat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan berbagai aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan pembelajaran BMR di Kota Pekanbaru, dapat ditarik gambaran umum mengenai pelaksanaan kebijakan ini. Kebijakan pembelajaran BMR telah lama diimplementasikan di Kota Pekanbaru, dimulai sejak

Tabel 3.1 Alokasi Waktu Pembelajaran

No	Alokasi Waktu	Alokasi intrakurikuler Per tahun	Alokasi Intrakurikuler Per Minggu	Alokasi Projek Pertahun	Total JP Per tahun
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	72 (2)	2	36	108
2	Pendidikan Pancasila	72 (2)	2	36	108
3	Bahasa Indonesia	180 (5)	5	36	216
4	Matematika	144 (4)	4	36	180
5	IPA	144 (4)	4	36	180
6	IPS	108 (3)	3	36	144
7	Bahasa Inggris	108 (3)	3	36	144
8	Penjas Orkes	72 (2)	2	36	108
9	Informatika	72 (2)	2	36	108
10	Seni Budaya (Seni Tari)	72 (2)	2	36	108
11	Muatan Lokal : Budaya Melayu Riau (BMR)	72	2	36	72

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, 2024.

Tabel diatas memberikan gambaran tentang bagaimana waktu dialokasikan untuk berbagai mata pelajaran. Bahasa Indonesia dan Matematika mendapatkan alokasi waktu yang lebih besar dibandingkan mata pelajaran lain, yang mencerminkan pentingnya kedua mata pelajaran ini dalam kurikulum. Muatan Lokal Budaya Melayu Riau (BMR) memiliki alokasi waktu yang relatif lebih rendah dibandingkan mata pelajaran lain.

3.1 Implementasi Kebijakan Pembelajaran Budaya Melayu Riau Dalam Kurikulum Pendidikan Kota Pekanbaru (Teori George C. Edward III)

Pada bagian ini mempresentasikan temuan penelitian mengenai

implementasi kebijakan pembelajaran budaya Melayu Riau dalam kurikulum pendidikan Kota Pekanbaru tahun 2023-2024, yang dianalisis melalui teori Implementasi Kebijakan *George C. Edward III*. Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yaitu Peraturan Gubernur Riau Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau di Pekanbaru.

Dari wawancara peneliti dengan beberapa informan, diketahui bahwa penerapan pembelajaran budaya Melayu Riau di kelas itu selama 2 JP atau 2 jam pelajaran selama satu minggu. Penelitian ini melibatkan wawancara dengan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru bidang SD dan SMP, Kepala Sekolah, Guru mata pelajaran Budaya Melayu Riau di sejumlah sekolah di Kota Pekanbaru.

3.1.1 Komunikasi

Teori *George C. Edward III* (1980) memberikan kerangka yang berguna untuk menganalisis komunikasi dalam implementasi kebijakan. Menurutnya, komunikasi yang efektif harus memenuhi tiga dimensi, yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi

3.1.1.1 Transformasi informasi dimensi (transmisi)

Kerangka teori implementasi kebijakan *George C. Edward III* (1980), komunikasi merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan implementasi. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan tersampaikan kepada pihak-pihak yang relevan, sehingga mereka memahami tujuan, manfaat, dan cara pelaksanaan kebijakan. Dimensi komunikasi, transmisi informasi memegang peranan penting sebagai langkah awal dalam proses komunikasi. Transmisi informasi yang efektif memastikan bahwa pesan kebijakan sampai kepada penerima yang dituju.

Transmisi informasi kebijakan pembelajaran Budaya Melayu Riau (BMR) di Kota Pekanbaru menghadapi kendala. Komunikasi efektif merupakan faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan (*George C.*

Edward III, 1980). Transmisi informasi yang efektif memastikan pesan kebijakan sampai kepada penerima yang dituju. Dalam konteks BMR, transmisi informasi mencakup penyampaian informasi mengenai tujuan kebijakan, kurikulum, metode pengajaran, dan sumber daya. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan BMR belum menjangkau semua sekolah secara efektif. Beberapa sekolah

Kepala sekolah SD IT Al-Birru, SMP Dakwah, dan SMP 34 Kota Pekanbaru mengungkapkan bahwa sosialisasi kebijakan BMR belum dilakukan secara memadai. Dinas Pendidikan berupaya melakukan sosialisasi melalui Kelompok Kerja Guru (KKG), namun efektivitasnya perlu dipertanyakan. Kurangnya koordinasi antara Dinas Pendidikan dan LAMR, kurangnya pemanfaatan media komunikasi yang efektif menyebabkan transmisi informasi tidak efektif.

Hal ini berdampak pada kurangnya pemahaman guru dan kepala sekolah mengenai tujuan, kurikulum, dan metode pengajaran BMR, sehingga implementasi kebijakan tersebut terganggu. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas transmisi informasi, seperti peningkatan koordinasi antara Dinas Pendidikan dan LAMR, pemanfaatan media komunikasi yang lebih efektif, dan perluasan sasaran sosialisasi untuk mencakup semua guru yang mengajar BMR. Dengan demikian, diharapkan implementasi kebijakan BMR dapat berjalan lebih efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu meningkatkan pemahaman dan

apresiasi terhadap budaya Melayu Riau di kalangan siswa.

3.1.1.2 Kejelasan

Kejelasan informasi kebijakan pembelajaran Budaya Melayu Riau (BMR) di Kota Pekanbaru masih menghadapi kendala. Kejelasan informasi merupakan faktor penting yang mempengaruhi pemahaman dan interpretasi para pelaksana kebijakan. Informasi yang jelas membantu mengurangi kebingungan dan interpretasi yang salah, serta meningkatkan kepercayaan para pelaksana terhadap kebijakan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kejelasan informasi kebijakan BMR masih perlu ditingkatkan. Guru-guru dan kepala sekolah belum sepenuhnya memahami isi kebijakan BMR, terutama terkait dengan spesifikasi materi ajar dan metode pembelajaran. Kurangnya sosialisasi dan kurangnya sumber daya yang memadai menjadi kendala dalam meningkatkan kejelasan informasi. Guru SD IT Al-Birru, yang bukan merupakan guru BMR, mengakui bahwa ia belum sepenuhnya memahami isi kebijakan BMR. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang memadai yang mengakibatkan guru merasa kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran BMR sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan.

Dinas Pendidikan perlu meningkatkan upaya sosialisasi kebijakan BMR kepada seluruh guru, dengan menggunakan bahasa yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Selain itu, perlu disediakan materi sosialisasi yang komprehensif dan mudah diakses oleh guru, seperti buku panduan, modul pelatihan, dan video tutorial. Kejelasan informasi dapat ditingkatkan

melalui penggunaan bahasa yang lugas dan mudah dimengerti, penyediaan panduan implementasi yang rinci, dan pemberian kesempatan bagi pihak terkait untuk mengajukan pertanyaan dan klarifikasi. Dengan demikian, diharapkan implementasi kebijakan BMR dapat berjalan lebih efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap budaya Melayu Riau di kalangan siswa.

Dalam konteks implementasi kebijakan BMR, kejelasan informasi menjadi sangat penting, mengingat kompleksitas materi pembelajaran yang mencakup berbagai aspek budaya Melayu Riau, seperti sejarah, adat istiadat, seni, dan bahasa. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kejelasan informasi, seperti penyusunan panduan yang komprehensif mengenai materi pembelajaran, penyelenggaraan pelatihan yang intensif bagi guru-guru BMR, serta penyediaan sumber-sumber belajar yang mudah diakses dan dipahami.

3.1.1.3 Konsistensi

Konsistensi informasi kebijakan pembelajaran Budaya Melayu Riau (BMR) di Kota Pekanbaru masih menjadi tantangan. Konsistensi informasi sangat penting untuk menghindari kebingungan dan memastikan bahwa seluruh pihak terkait memiliki pemahaman yang sama mengenai kebijakan yang diimplementasikan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa konsistensi informasi kebijakan BMR masih perlu ditingkatkan. Kepala sekolah SMP Dakwah mengungkapkan bahwa tidak ada pelatihan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan untuk guru BMR,

dan sekolah mengambil inisiatif untuk menawarkan buku dari penerbit kepada siswa. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua sekolah mendapatkan dukungan yang sama dari Dinas Pendidikan terkait dengan pelatihan guru dan penyediaan buku penunjang BMR.

Guru SD IT Al-Birru juga mengeluhkan hal yang sama terkait pelatihan. Mereka mengharapkan agar ada pelatihan dan forum komunikasi untuk guru BMR, serta penyediaan sumber daya yang memadai untuk mendukung pembelajaran BMR. Perwakilan dari LAMR Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa pelatihan guru memang ada, namun sistemnya adalah sekolah yang berinisiatif untuk meminta adanya pelatihan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa peran LAMR dalam pelatihan guru BMR lebih bersifat pasif dan reaktif, daripada aktif dan proaktif.

Persaingan politik juga menjadi faktor yang mempengaruhi konsistensi informasi kebijakan BMR. LAMR Kota Pekanbaru menyatakan bahwa kerjasama dengan Dinas Pendidikan sebelumnya sudah ada, namun karena persaingan politik, program-program dan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan terhambat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan konsistensi informasi kebijakan BMR, seperti peningkatan koordinasi antara Dinas Pendidikan dan LAMR, penyediaan sumber daya yang memadai, dan penyelenggaraan pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan implementasi kebijakan BMR dapat berjalan lebih efektif dan

mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap budaya Melayu Riau di kalangan siswa.

3.1.2 Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pembelajaran Budaya Melayu Riau (BMR) di Kota Pekanbaru. Hasil wawancara menunjukkan adanya permasalahan dalam ketersediaan sumber daya, terutama terkait dengan pelatihan guru, buku, dan alat peraga. Dinas Pendidikan bidang SMP mengakui tantangan terkait sumber daya, seperti kurangnya guru BMR yang memiliki kualifikasi yang memadai. Kepala sekolah dan guru juga mengungkapkan kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran BMR karena kurangnya sumber daya, seperti buku dan alat peraga.

LAMR Kota Pekanbaru menyoroti masalah SDM yang tidak merata dan rencana pembukaan prodi khusus guru BMR untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, LAMR juga mengungkapkan permasalahan terkait dengan penerbitan buku BMR, termasuk pengaruh faktor politik dan keuangan.

Salah satu guru Sekolah Dasar Kota Pekanbaru, mengungkapkan keterbatasan sumber daya yang sangat krusial, seperti buku yang tidak diberikan kepada siswa dan harus berbagi dengan teman sekelas. Kepala Sekolah SMP Dakwah mengungkapkan keterbatasan sumber daya yang dihadapi, seperti guru yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang spesifik di bidang BMR dan tidak adanya pelatihan untuk guru BMR. Guru SMP Dakwah juga

menjelaskan tentang sumber daya yang ada, seperti buku yang dianjurkan untuk dibeli oleh siswa, namun alat peraga masih belum tersedia.

Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan upaya-upaya seperti peningkatan koordinasi antara Dinas Pendidikan dan LAMR, penyediaan sumber daya yang memadai, dan penyelenggaraan pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan implementasi kebijakan BMR dapat berjalan lebih efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap budaya Melayu Riau di kalangan siswa. Selain itu, perlu juga dilakukan evaluasi terhadap kebijakan yang ada dan melakukan perubahan jika diperlukan. Misalnya, perlu dipertimbangkan untuk memasukkan mata pelajaran BMR ke dalam Dapodik, sehingga dapat meningkatkan motivasi guru dan siswa untuk mempelajari BMR.

Dengan demikian, diharapkan implementasi kebijakan BMR dapat berjalan lebih efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap budaya Melayu Riau di kalangan siswa.

3.13 Disposisi

Disposisi merupakan salah satu faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pembelajaran Budaya Melayu Riau (BMR) di Kota Pekanbaru. Disposisi yang positif, yang ditandai dengan dukungan, komitmen, dan keyakinan terhadap manfaat kebijakan, akan mendorong para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan dengan sebaik-baiknya.

Guru SD IT Al-Birru menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pembelajaran BMR. Beliau menjelaskan bahwa BMR telah dilaksanakan sejak lama, bahkan sejak kurikulum KTSP, dan terus berlanjut hingga kurikulum merdeka. Hal ini menunjukkan bahwa Sekolah Dasar yang ada di Pekanbaru memiliki keyakinan yang kuat mengenai pentingnya pembelajaran BMR dalam melestarikan dan mengembangkan budaya Melayu Riau.

Kepala Sekolah SMP Dakwah mengakui pengaruh positif BMR terhadap siswa. Beliau menyebutkan bahwa BMR memberikan pengaruh yang besar terhadap siswa, karena mereka menjadi tahu tentang Riau, ciri khas makanan Riau, dan bentuk kesenian Riau. Namun, beliau juga mengakui bahwa fasilitas untuk guru masih kurang, dan pelatihan untuk guru BMR sangat minim.

Guru SMP Dakwah menjelaskan metode pengajaran yang digunakan, seperti ceramah, gambar, penugasan, dan kunjungan lapangan. Beliau juga menyebutkan bahwa siswa pernah mengunjungi Rumah Tuan Kadi dan Pelabuhan Sungai Duku, serta melakukan wawancara. Metode pengajaran yang bervariasi dapat membantu siswa untuk memahami materi pembelajaran secara lebih baik dan meningkatkan minat mereka terhadap BMR. Antusiasme siswa dan dukungan orang tua merupakan modal yang sangat berharga dalam keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan. Dengan adanya antusiasme siswa, guru akan lebih termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran yang menarik dan efektif. Dengan adanya dukungan

orang tua, siswa akan merasa lebih dihargai dan diperhatikan, serta memiliki kesempatan yang lebih besar untuk belajar di rumah.

Untuk meningkatkan disposisi guru dan siswa terhadap BMR, perlu dilakukan upaya-upaya seperti peningkatan koordinasi antara Dinas Pendidikan dan LAMR, penyediaan sumber daya yang memadai, dan penyelenggaraan pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan implementasi kebijakan BMR dapat berjalan lebih efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap budaya Melayu Riau di kalangan siswa.

3.1.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pembelajaran Budaya Melayu Riau (BMR) di Kota Pekanbaru. Struktur birokrasi yang efektif akan memfasilitasi koordinasi, komunikasi, dan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan. Dinas Pendidikan bidang SMP memberikan pandangan tentang cakupan tanggung jawab, yaitu terhadap sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Pekanbaru, baik negeri maupun swasta. Hal ini menunjukkan adanya pemahaman yang jelas mengenai batasan wilayah kerja Dinas Pendidikan bidang SMP dalam implementasi kebijakan BMR.

Wakil Kepala Sekolah SD 117 Pekanbaru, Ibu Nelda, menjelaskan tentang kerjasama dengan LAMR, meskipun terbatas pada penerbitan buku. Ibu Nelda menjelaskan bahwa sekolah bekerja sama dengan beberapa

penerbit yang mengambil buku dari LAMR, seperti LKS dan buku penunjang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa LAMR memiliki peran dalam penyediaan sumber belajar untuk pembelajaran BMR.

Kepala Sekolah SMP Dakwah menjelaskan peran sekolah dalam memfasilitasi BMR, seperti menyediakan buku paket, memberikan izin untuk mengikuti pelatihan dan acara-acara terkait budaya Melayu Riau, serta memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan-kegiatan BMR. Peran kepala sekolah sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi implementasi kebijakan pendidikan. Untuk meningkatkan efektivitas struktur birokrasi, perlu dilakukan upaya-upaya seperti peningkatan koordinasi antara Dinas Pendidikan dan LAMR, penyediaan sumber daya yang memadai, dan penyelenggaraan pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan implementasi kebijakan BMR dapat berjalan lebih efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap budaya Melayu Riau di kalangan siswa.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

Implementasi kebijakan pembelajaran Budaya Melayu Riau (BMR) di Kota Pekanbaru menunjukkan dinamika kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Meskipun terdapat tantangan yang signifikan dalam hal komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi, indikator disposisi menonjol sebagai elemen kunci yang

memberikan harapan bagi keberhasilan implementasi kebijakan ini. Disposisi positif, yang tercermin dari komitmen pihak sekolah dan antusiasme siswa, menjadi fondasi penting dalam proses pembelajaran BMR. Kepala sekolah menunjukkan dukungan terhadap implementasi kebijakan, sementara siswa memperlihatkan minat dan semangat dalam mempelajari budaya Melayu Riau. Kondisi ini menciptakan iklim belajar yang kondusif dan memotivasi siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran, namun, disposisi positif ini saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan secara optimal. Tantangan dalam komunikasi, seperti inkonsistensi informasi dan kurangnya inisiatif proaktif dari LAMR Pekanbaru, dapat menghambat pemahaman dan penerapan kebijakan di tingkat sekolah. Keterbatasan sumber daya, terutama guru yang kompeten dan materi ajar yang relevan, juga menjadi kendala serius yang memengaruhi kualitas pembelajaran BMR. Selain itu, struktur birokrasi yang belum optimal, dengan koordinasi yang kurang efektif antara Dinas Pendidikan, LAMR, dan pihak sekolah, dapat menghambat implementasi kebijakan secara efisien. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya yang terintegrasi dan komprehensif untuk mengatasi berbagai kendala yang ada, sambil terus memperkuat disposisi positif yang telah terbangun. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui pelatihan dan pengembangan guru BMR, serta penyediaan materi ajar yang relevan dan menarik, akan meningkatkan efektivitas

pembelajaran. Penguatan koordinasi antar lembaga, dengan membangun mekanisme komunikasi yang jelas dan efektif, akan memastikan implementasi kebijakan yang terarah dan efisien. Dengan mengatasi kedala-kendala tersebut dan terus memelihara serta memperkuat disposisi positif, implementasi kebijakan pembelajaran BMR di Kota Pekanbaru dapat mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu melestarikan dan mengembangkan budaya Melayu Riau sebagai bagian integral dari identitas dan karakter masyarakat Kota Pekanbaru.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru diharapkan dapat menyusun program pelatihan guru BMR yang terstruktur dan berkelanjutan. Program ini sebaiknya melibatkan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) sebagai narasumber, guna memberikan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai budaya Melayu Riau kepada guru, selain itu, penyediaan materi ajar BMR yang relevan, berkualitas, dan mudah diakses oleh guru dan siswa. Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Pekanbaru diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam pengembangan kurikulum dan materi ajar BMR. Kontribusi LAMR dalam merumuskan materi ajar yang sesuai dengan nilai-nilai budaya Melayu Riau dan relevan dengan kebutuhan siswa sangat diperlukan. Kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan pihak sekolah dalam memberikan pelatihan dan pendampingan kepada guru juga menjadi kunci. LAMR dapat

memberikan pelatihan kepada guru mengenai cara mengintegrasikan nilai-nilai budaya Melayu Riau kedalam proses pembelajaran. Pihak sekolah, diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan dukungan terhadap implementasi pembelajaran BMR. Dukungan kepada guru dalam mengembangkan pembelajaran BMR yang kreatif dan inovatif juga sangat penting. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan pembelajaran BMR, dengan metode penelitian yang lebih beragam, baik kuantitatif, kualitatif, maupun campuran. Penelitian komparatif mengenai implementasi kebijakan pembelajaran BMR di berbagai daerah juga diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai praktik-praktik terbaik.

G. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rahman bin Haji Mohd. (2018). *Pendidikan Melayu: Kurikulum dan Metodologi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Ahmad Dahlan. (2014). *Sejarah Melayu*. KPG.
- Azhari, I., Pakhpahan, R., Tanjung, M., Faridah, & Abdurrahman, M. K. (2013). *Kesultanan Serdang: Perkembangan Islam pada Masa Pemerintahan Sulaiman Shariful alamsyah*. Puslitbang Lektur dan Khasanah Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI.

- Jumroh, Pratama, M. Y. J., & Insani, S.J. (2021). *Implementasi Pelayanan Publik: Teori dan Praktik*. Penerbit Insan Cendekia Mandiri.
- Laksana, D. N. L., Awe, E. Y., Sugiani, K. A., Ita, E., Rawa, N. R., & Noge, M. D. (2021). *Desain pembelajaran berbasis budaya*. Penerbit NEM
- Mohd. Yusof bin Hj. Abdullah. (2015). *Kurikulum Melayu: Sejarah dan Perkembangan*. Penerbit Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Moleong, L. J. (2017). *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*. PT Remaja Rosdakarya.
- Sinaga, D (2023). *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif)* UKI PRESS (1). UKI Press.
- Sutama. (2019). *Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasi*. Penerbit CV Budi Utama
- Tun Sri Lanang. (2004). *Sejarah Melayu*. Yayasan Karyawan.
- Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. H. M. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development(RnD)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahman Kolaka.
- ### Jurnal
- Alfi, D. Z. (2021). Studi Kebijakan Tentang Kurikulum Pengembangan Muatan Lokal. *Rabbani: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 1–14.
- Aziz, M. (2023). Analisis Kemampuan Menulis ArabMelayu KelasV SD Alwasliyah 2 Univa Medan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1(2), 116–119.

- Aziz, M., Ibrahim, H., Bariah Rambe, K., & Wirdayani Adelia, R. (2024). Analisis Kurikulum Pendidikan Islam Implementasi Kurikulum Muatan Lokal Aksara Arab Melayu MIS Terpadu Muhammad Fahri. *Jurnal Pendidikan Dan Anak Usia Dini*, 5(1), 40–46.
- Aziz, M., & Qadarria, L. (2023). Analisis Kurikulum Pendidikan Islam Dalam Evaluasi Kurikulum Muatan Lokal Pembelajaran Aksara Arab Melayu Kelas V Di Fastabiqul Khoirot Paya Bakung. *Merdeka: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2), 379–385.
- Chaerani, A., Febriana, R., Valeria Br Tarigan,T., M. J., Putra, A., & Nisa, M. (2024). Implementasi Kurikulum Berbasis Budaya Melayu Riau Di Sd Negeri 189 Pekanbaru. *Educatioanl Journal: General and Specific Research Vol. 4 No. 3 Oktober 2024, Page 677-687 e-ISSN: 2808-5418 IMPLEMENTASI*, 4, 677–687.
- Firzal, Y. (2019). Rekonstruksi Identitas Sosial Kebudayaan di Perkotaan. *EMARA: Indonesian Journal of Architecture*, 5(1), 1–5.
- Hamdi, I. (2016). Dinamika Aktualisasi Diri Pemuda Rantau Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi (Studi Pada Mahasiswa Rantau Asal Sumatera Barat Di Asrama Putri Bundo Kanduang Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(3), 306.
- Hanif, M., & Dwi, D. (2021). the Role of Islamic Government in Bumi Melayu. *Jurnal Bina Ummat: Membina Dan Membentengi Ummat*, 4(2), 11–18.
- Jubba, H., Rafi, M., & Qodir, Z. (2021a). Penonjolan Identitas Melayu Islam oleh Pemerintah dan Masyarakat Riau. *Jurnal Sosial Politik*, 7(1), 89–98.
- Jubba, H., Rafi, M., & Qodir, Z. (2021b). Politik Identitas Melayu Islam sebagai Upaya Mewujudkan Budaya Berintegritas. *Politicon : Jurnal Ilmu Politik*,
- Mahayana, M. S. (2022). Dunia Melayu: Tantangan dan Prospeknya di Masa Depan. *Jurnal Nusantara Raya*, 1(1), 11–27.
- Majid, A. S., & Ramadan, Z. H. (2021). Etnopedagogi Pada Mata Pelajaran Budaya Melayu Riau (BMR) di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(3), 1223–1230.
- Naratiba, R., Suroyo, S., & Fatmasari, R. (2021). Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Dalam Pembelajaran Budaya Melayu Riau Di SD Negeri 183 Pekanbaru. *Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 10(2), 208–216.
- Shah Mohd Akmal Abdul Halim. (2022). Politik Lama Versus Politik Baharu: Dinamika Politik Melayu dalam Pilihan Raya Negeri Johor 2022. *Global Journal Al Thaqafah*.
- Tambak, S. (2018). Implementasi Budaya Melayu Dalam Kurikulum Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Di Riau. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 41(2), 361–383.
- Yoan Colina. (2021). Implementasi Kebijakan Pembangunan Bidang Agama dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.

- Danum Pambelum: Jurnal Teologi Dan Musik Gereja, 1(2), 236–245.*
- Zainuddin, M. (2018). Mekanisme Lembaga Adat Melayu Riau dalam Melestarikan Wisata Budaya di Provinsi Riau. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 6(1).
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013.
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kurikulum Muatan lokal Budaya Melayu Riau di Pekanbaru
- Sumber Online**
- Eka. "Mulok BMR SMA/SMK Berhasil Masuk Dapodik, Prof Junaidi: Kita Mulai untuk SD/SMP". *dewanpendidikanriau.com*, Senin, 23 Desember 2024, <https://dewanpendidikanriau.com/metropolis/2024/12/23/mulok-bmrsmasmk-berhasil-masuk-dapodik-prof-junaidi-kita-mulai-untuk-sdsmp/>.